

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

General Data Protection Regulation.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Yyk.

## B. Buku

Allegrì, Maria Romana. *“The Right to be Forgotten in the Digital Age”*.

Ali, Achmad. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Materi Perkuliahan Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. 1998.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.

Brandeis, Louis. “The Right to Be Let Alone.” in *Brandeis on Democracy*, edited by Philippa Strum, 197-207, Kansas: University Press of Kansas, 1995.

Bungin, Burhan. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, & Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Kencana, 2005.

Clough, Jonathan. *Principles of Cybercrime*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2015.

Eddyono, Sri Wiyanti dan Fatkhurozi. *Kertas Kebijakan Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban: Pentingnya Peraturan Hukum yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: YLBH APIK Jakarta, 2021.

Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Park Avenue: Russell Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence M. *Legal Culture and Welfare State*. New York: Walter de Gruyter, 1986.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Lima, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- International IDEA Constitution-Building Primer. *Limitation Clauses*. Strömsborg: International IDEA, 2014.
- Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- LBH Apik Jakarta. *Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2021: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Negara Wajib Memberikan Ruang Aman*. Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2021.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Pers, LBH. *Hak atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*. Jakarta: LBH Pers, 2018.
- Rumadan, Ismail. *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Sumardjono, Maria S. W. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

The UK report from an Australian Research Council funded project (DP170101433) *Revenge Pornography: The Prevalence and Nature of Non-Consensual Imagery and the Implications for Law Reform*. “Shattering Lives and Myths: A Report on Image-Based Sexual Abuse”, (2016) hlm. 16.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Dr. Yulia, S.H., M.H. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

### C. Jurnal

Arundari, Ni Putu Resha dan Sagung Putri M. E. Purwani. “Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksstorsi dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 11, No. 1 (2021): 121-132.

Baets, Antoon De. “A Historian’s View on the Right to be Forgotten”, *International Review of Law, Computer & Technology* Vol. 30, No. 1-2 (2016): 57-66.

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1 (Juni, 2020): 20-33.

Bunga, Dewi. “Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, No. 1 (Maret, 2019): 1-15.

Christianto, Hwian. “Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 32, No. 2 (Juni, 2020): 175-192.

Christiawan, Rio. “Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi: Kajian Putusan Nomor

1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo” *Jurnal Yudisial* Vol. 11, No. 3 (Desember, 2018): 367-384.

Cripps, Jenna dan Lana Stermac, “Cyber-Sexual Violence and Negative Emotional States among Women in a Canadian University”, *International Journal of Cyber Criminology* Vol. 12, Issue 1 (Juni, 2018): 171-186.

Darmika, Ika. “Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 3 (Desember, 2016): hlm. 429-436.

Fabbrini, Federico dan Edoardo Celeste. “The Right to Be Forgotten in the Digital Age: The Challenges of Data Protection Beyond Borders”, *German Law Journal* Vol. 21, S1 (Maret, 2020): 55-65.

Kamrul Faisal. “Balancing between Right to Be Forgotten and Right to Freedom of Expression in Spent Criminal Convictions”, *Security and Privacy* Vol. 4, Issue 4 (March, 2021): 1-14.

Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri. “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3, No. 7 (Juli, 2022): 520-541.

Gregory, Alison, *et al.* “Perceptions of Peer Support for Victim-Survivors of Sexual Violence and Abuse: An Exploratory Study With Key Stakeholders” *Journal of Interpersonal Violence* Vol. 37 (15-16), (2022): 4036-4065.

Gupta, Manasvi. “A Study on Right to be Forgotten”, *International Journal of Law Management & Humanities* Vol. 4, Iss. 3 (2021): 586-592.

Hutapea, Sintong Arion. “Right to be Forgotten sebagai Bentuk Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi”, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia)* Vol. 1, No. 1 (Juni, 2021): 1-10.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Andy Usmina Wijaya. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi” *Jurnal Al-Wasath* Vol. 2, No. 1 (2021): 19-32.

Mantelero, Alessandro. “The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the Roots of the ‘Right to Be Forgotten’”, *Computer Law & Security Review* Vol. 29, Issue 3 (Juni, 2013): 229-235.

- Masania, Alen Triana. “Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, No. 7 (September, 2015): hlm. 13-17.
- Pahlevi, Farida Sekti. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal Sytem Lawrence M. Freidman”, *Jurnal El-Dusturie* Vol. 1, No. 1 (Juni, 2022): hlm. 23-42.
- Politou, Eugenia, *et al.* “Backups and the right to be forgotten in the GDPR: An uneasy relationship” *Computer Law & Security Review* Vol. 34, Issue 6, (Desember, 2018), 1247-1257.
- Putri, Arini Ferya dan Tantimin, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip *Right to be Forgotten* di Indonesia”, *Jurnal Justisia* Vol. 7, No 1 (2022): 168-187.
- Rosen, Jeffrey. “Symposium Issue: The Right to be Forgotten”, *Stanford Law Review Online* Vol. 64, No. 88 (February, 2012): 88-92.
- Sari, Zalzabila Armadani Purnama. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, *Jurnal Magister Hukum Argumentum* Vol 8, No. 1 (Maret, 2022): 1-13.
- Schenk, Samantha. “Cyber-Sexual Harassment: The Development of the Cyber-Sexual Experiences Questionnaire”, *McNair Scholars Journal* Vol. 12, Iss. 1., Article 8 (2008): 82-91.
- Stokes, Jenna K. “The Indecent Internet: Resisting Unwarranted Internet Exceptionalism in Combating Revenge Porn”, *Berkeley Technology Law Journal* Vol. 29 (2014): 929-952.
- TNA, Nguyen. “European ‘Right to be Forgotten’ As A Remedy for Image-Based Sexual Abuse: A Critical Review”, *KnowEx Social Sciences Journal* Vol. 2, No. 1 (2022): 59-72.
- Vavra, Ashley Nicole. “The Right to Be Forgotten: An Archival Perspective” *The American Archivist* Vol. 81, No. 1 (2018): 100-111.
- Warren, Samuel D. dan Louis D. Brandeis. “The Right to Privacy”, *Harvard Law Review* Vol. 4, No. 5 (Desember, 1890): 193-220.
- Wolters, P.T.J (Pieter). “The territorial effect of the right to be forgotten after *Google v CNIL*” *International Journal of Law and Information Technology* Vol. 29, Issue 1, (2021): 57-75.

#### D. Tugas Akhir

Adawiyah, Tiara Robiatul. “Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Disertasi, Universitas Sebelas Maret, 2003.

Sintia, Imelia. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Zafrah, Hana. “Peran Polisi Siber dalam Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online* Melalui Pendekatan Hukum Berperspektif Adil Gender”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2022.

#### E. Internet

All About Sex Education. “Electronic Violence”, <https://allaboutsexeducation.com/en/electronic-sexual-violence/> (accessed February 12, 2023).

Awas KBGO. “Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS”, <https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/> (accessed February, 12 2023).

Center for Digital Society. “[PRESS RELEASE] Social Media: A New Space for Sexual Harassment, What Should Citizens Do?”, <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2021/05/05/press-release-social-media-a-new-space-for-sexual-harassment-what-should-citizens-do-difussion-48/> (accessed June 15, 2023).

Citra, Lea. “Stop Blow Up Identitas Korban Kekerasan Seksual Demi Konten”, <https://kbr.id/nasional/11-2022/stop-blow-up-identitas-korban-kekerasan-seksual-demi-konten-/110136.html> (accessed June 17, 2023).

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. “Pemerintah Susun Peraturan Pelaksana UU TPKS”, <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2022/06/08/pemerintah-susun-peraturan-pelaksana-uu-tpks/> (accessed January 28, 2023).



EUR-Lex. “Right to be forgotten on the Internet”, <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/right-to-be-forgotten-on-the-internet.html> (accessed March 13, 2023).

European Parliament. “Personal data protection”, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/157/personal-data-protection#:~:text=Article%2016%20of%20the%20TFEU,the%20scope%20of%20Union%20law> (accessed June 19, 2023).

GDPR. “Right to be Forgotten”, <https://gdpr-info.eu/issues/right-to-be-forgotten/> (accessed January 29, 2023).

InfoCuria. “Judgment of The Court: In Case C-131/12 Goofle Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González”, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=en> (accessed March 13, 2023).

Kompas.com. Perjalanan RUU TPKS, Enam Tahun Terombang-ambing di DPR”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/24/06373451/perjalanan-ruu-tpks-enam-tahun-terombang-ambing-di-dpr> (accessed February 12, 2023).

Lumbanrau, Raja Eben. “Kekerasan *online*: Korban *revenge porn* dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar - ‘Saya berkali-kali mencoba bunuh diri’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820> (accessed 17 January, 2022).

Online, Hukum. “Ini Bedanya Konsep *Right to be Forgotten* di Indonesia dengan Negara Lain”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt586214ee33609> (accessed January 30, 2023).

Online, Hukum. “Menenal ‘*Right To Be Forgotten*’”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menenal-iright-to-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirie--lt586219e8e529d/?page=all> (accessed March 15, 2023).

Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan. “Kekerasan Perempuan Meningkat Selama Pandemi, Hanya 10% yang Berani Melapor”, <http://www.pskp.or.id/2020/08/20/kekerasan-perempuan-meningkat-selama-pandemi-hanya-10-yang-berani-melapor/> (accessed October 24, 2022).

SAFENet. “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online*”. <https://id.safenet.or.id/wp->



[content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf](#) (accessed October 22, 2022).

Science Daily. “Weak spots in Europe’s ‘Right to be Forgotten’ data privacy law”, <https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160607120801.htm> (accessed June 17, 2023).

Surfshark. “How many people in Europe use their “right to be forgotten” online?”, <https://surfshark.com/blog/right-to-be-forgotten-requests> (accessed June 19, 2023).

United Nations Human Rights. “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation> (accessed June 20, 2023).

United Nations High Commissioner for Refugees. “Gender-Based Violence”, <https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html#:~:text=Gender%2DBased%20violence%20refers%20to,of%20power%20and%20harmful%20norms> (accessed November 1, 2022).

United Nations World Data Forum. “Digital Connectivity and Women and Girls’ Risk for Cyber-sexual Harassment in the COVID-19 Era”, <https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/digital-connectivity-and-cyber-sexual-harassment/> (accessed January 17, 2023).

*Violence Against Women Learning Network*. “Technology-Related Violence Against Women”, [https://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/issuebased-newsletters/issue-4/Issue\\_4\\_LN\\_Newsletter\\_2013\\_Online.pdf](https://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/issuebased-newsletters/issue-4/Issue_4_LN_Newsletter_2013_Online.pdf) (accessed January 17, 2023).

## F. Hasil Penelitian Lapangan

Hasil Wawancara dengan Rumi Untari, selaku pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, pada tanggal 11 Mei 2023.

Hasil Wawancara dengan Kartika Saraswati dan Dika Wicaksono, selaku pihak Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tanggal 13 Juni 2023.

Hasil Wawancara dengan pihak Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, pada tanggal 19 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Lidwina Inge Nurtjahyo, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 13 Mei 2023.

Hasil Wawancara dengan Siti Husna, selaku pihak Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2023.